

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Dasar Pemikiran

Proses pembangunan membutuhkan daya dukung yang maksimal dari berbagai aspek, karena pada dasarnya keberhasilan pembangunan merupakan resultante dari suatu proses yang melibatkan banyak variabel terkait, baik fisik maupun psikhis, material maupun spiritual, lokal maupun nasional. Dalam kacamata budaya setidaknya ada empat faktor dasar yang merupakan modal dalam proses pembangunan, yaitu *anthropos*, *oikos*, *tekno*, dan *ethos* (Poespowardojo, 1993:13).

*Anthropos* yang berarti manusia merupakan variabel determinan dalam proses pembangunan. Hal ini disebabkan kekhasan dan keistimewaan manusia itu sendiri dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya, yaitu mempunyai kemampuan yang kreatif dalam mengolah dan memanfaatkan dunianya secara manusiawi. Memang manusia hadir di dunia ini tidaklah dengan sendirinya menjadi makhluk yang paripurna, melainkan merupakan sosok yang sedang *menjadi* dengan cara melakukan aktualisasi diri dan memberikan nilai kemanusiaan pada alam lingkungannya melalui

karya-karyanya. Itulah sebabnya dalam konteks pembangunan, manusia tidak saja bertindak sebagai faktor pendukung melainkan lebih jauh sebagai pencipta dan sekaligus tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Selanjutnya adalah *oikos* yang berarti lingkungan. Lingkungan di sini tidak sekedar berarti tempat dimana manusia melakoni kelangsungan hidupnya, melainkan lebih merupakan *lebenswelt* atau medan yang di dalamnya manusia berjuang untuk hidup melalui karya dan aktifitasnya. Melalui lingkungan inilah manusia melakukan proses pembudayaan sehingga pada akhirnya menjadikan dirinya sebagai makhluk yang berbudaya. Oleh karena itu, atas dasar hubungan yang intim antara manusia dengan lingkungannya itulah, maka memelihara dan menjaga lingkungan alam demi keselamatan dan kesejahteraan hidup masyarakat, merupakan tuntutan moral yang berumbar pada suara hati nurani.

Faktor ketiga adalah *teknos* yang berarti alat. Alat ini merupakan perpanjangan tangan manusia dalam mengolah alam. Dengan kata lain alat ini mengatasi keterbatasan fisik manusia dalam membudayakan alam untuk kepentingan dan kesejahteraan hidupnya. Tingkat perkembangan tekne ini mencerminkan perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri. Bahkan Franklin menyebut manusia sebagai *a tool making animal*, manusia akan menunjukkan martabatnya sebagai

manusia sepanjang dia mampu menciptakan alat yang digunakan untuk mengkaryakan dunianya.

Faktor keempat adalah *ethnos* yang berarti komunitas, yaitu proses dan hasil interaksi dari para individu anggota masyarakat. Faktor *ethnos* ini pun penting mengingat bahwa kebermaknaan karya dan kreatifitas dari setiap orang akan terwujud manakala dikomunikasikan dan diartikulasikan dalam jalinan dinamika komunitas, dan yang pada gilirannya akan dijadikan sebagai milik bersama. Itulah sebabnya keberhasilan-keberhasilan yang dicapai melalui proses pembangunan harus dapat dirasakan dan dilestarikan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Dari keempat faktor dasar pembangunan tersebut, yang paling menentukan dari semuanya adalah manusia atau yang dikenal sebagai sumber daya manusia. Manusia merupakan perencana, pelaksana, dan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Hal ini terkait dengan potensi kemanusiaan secara kodrati, yaitu mampu merasa, berkehendak, berpikir, berimajinasi, berkreasi, berkarya; tentang kehidupan pada taraf yang paling kompleks serta dalam jangkauan ruang dan waktu yang panjang.

Referensi yang paling otentik tentang hal tersebut adalah agama, misalnya Agama Islam (agama yang penulis peluk). Di dalam Al Quran dikatakan bahwa kehadiran manusia ke muka bumi ini dibekali dengan berbagai macam

potensi kemanusiaan, yang selanjutnya dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mengelola alam, serta menjadi khalifah di muka bumi ini (QS, 2:30). Morteza Mutahhari menggambarkan keunggulan manusia dalam empat dimensi (Dawam Rahardjo, 1985:126). Pertama bahwa manusia saja yang memiliki pengenalan terhadap diri dan lingkungan, kedua, manusia memiliki keinginan-keinginan yang menguasai manusia itu sendiri, ketiga, adanya tingkat dimana manusia dipengaruhi oleh keinginan-keinginan tersebut, serta keempat, manusia memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan. Keunggulan-keunggulan itulah yang mengantarkan manusia pada posisi khalifah di muka bumi.

Karakteristik sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh proses pembangunan nasional sudah tentu adalah manusia yang berkualitas. Kualitas di sini tidak sekedar menunjuk kepada karakteristik penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan menunjuk pula pada karakteristik mentalitas. Mentalitas ini berkenaan dengan sifat dan sikap dasar yang positif, seperti kejujuran, etos kerja yang tinggi, rela berkorban, pengabdian, dan sebagainya, juga kondisi yang peka terhadap kemajuan dan mampu menghargai hal-hal baru. Hal terakhir ini disyaratkan karena fenomena industrialisasi yang menghadapkan masyarakat pada cara kerja dan cara hidup baru dengan perlengkapan kebutuhan serta keterampilan yang

mengandalkan dasar pemahaman dan visi baru. Sehingga dengan demikian masyarakat tidak sekedar dapat terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional melainkan lebih jauh dari itu dapat menjadi promotor pembangunan.

Pembangunan nasional Indonesia yang dilaksanakan secara bertahap, terencana, berkesinambungan, sejak Pelita I sampai dengan Pelita V sekarang ini, telah menampakkan hasil yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara luas, tetapi juga tersedianya sarana dan prasarana di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi sebab terbukanya mobilitas usaha baik bagi sektor swasta maupun sektor pemerintah. Kesemua ini mengarah pada tercapainya kekuatan struktur perekonomian nasional, dengan sejumlah indikatornya seperti kenaikan GNP, berkembangnya ekspor dan perdagangan, tumbuh-kembangnya sektor industri, meluasnya kesempatan kerja, serta terciptanya pertanian yang maju.

Keberhasilan-keberhasilan pembangunan nasional telah pula mampu menimbulkan dinamisasi dan peningkatan kreatifitas masyarakat. Masyarakat telah mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam proses pembangunan dan mampu membawa diri dalam spirit kehidupan modern, seperti penampilan yang rasional, menghargai

waktu, bekerja secara efisien, membuat perencanaan yang mapan, serta melihat jangkauan kehidupan ke depan secara pasti. Mereka menjadi lincah dalam usaha dan perilaku, serta memiliki kemampuan dan kaya akan inisiatif dalam kehidupannya. Jadi memang ada hubungan timbal balik antara keberhasilan pembangunan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun masalahnya sekarang adalah apakah perubahan sikap, perilaku, dan mentalitas sebagai dampak lain dari keberhasilan pembangunan terjadi pada semua lapisan masyarakat. Dengan kata lain, apakah proses dan hasil pembangunan nasional telah menyentuh kehidupan seluruh masyarakat Indonesia.

Secara empirik tidak dapat dipungkiri, tampak bahwa sentuhan keberhasilan pembangunan nasional lebih efektif mengena pada kalangan tertentu, khususnya kalangan elit seperti kalangan terpelajar, lapisan atas, dan kaum profesional. Kalangan elit ini dalam waktu singkat dengan memanfaatkan peluang dan modal yang ada dapat dengan mudah melipatgandakan aset kekayaan mereka, sehingga dengan aset kekayaan yang melimpah ini mereka mampu menyerap informasi sebanyak mungkin yang sangat menguntungkan bagi pemeliharaan dan pengembangan aset kekayaannya. Melanglang ke seluruh dunia atau menyekolahkan anak di luar negeri bukan merupakan hal yang susah, karena semuanya dapat dicukupi



dengan harta kekayaannya.

Berbeda kondisinya dengan yang terjadi pada kalangan masyarakat bawah. Pada kalangan lapisan masyarakat bawah ini sentuhan-sentuhan tersebut belum terasakan secara efektif, bahkan mungkin pula banyak di antara mereka dari lapisan ini belum merasa tersentuh sama sekali oleh keberhasilan pembangunan nasional. Itulah sebabnya meskipun dinamika pembangunan nasional Indonesia tetap berjalan dan keberhasilan-keberhasilan pembangunan pun makin tampak, namun banyak pula masalah-masalah yang cukup mendasar, yang belum dapat terpecahkan, seperti masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, masalah pengangguran, dan sebagainya.

Memang disadari bersama bahwa pembangunan nasional merupakan proses yang panjang, yang penuh dinamika dalam mencapai cita-cita. Oleh karena itu fenomena-fenomena sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, dan semacamnya tidak dapat ditatap sebagai kondisi yang berstatus quo dalam alam pembangunan yang sudah selesai. Fenomena sosial tersebut merupakan bidang garap pembangunan pula yang sedang menuju ke arah cita-cita yang ideal yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual. Hal ini tampak dalam pola dasar pembangunan nasional, dimana ditegaskan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia

seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya (Ketetapan MPR RI, tahun 1993).

Namun mempercepat dinamika pembangunan nasional mencapai cita-citanya yang ideal itu merupakan keharusan. Bahkan hal ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, dengan cara mewujudkannya melalui karya-karya yang bermanfaat dalam profesinya masing-masing dengan dilandasi oleh semangat pengabdian.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang mendasar dan belum terpecahkan di negeri ini. Kondisi masyarakat miskin yang serba kurang, pendidikan yang rendah, jangkauan komunikasi yang sangat terbatas, memudahkan terjadinya involusi budaya yang kental. Mereka cenderung berpersepsi dan bersikap sempit serta eksklusif sebagai manifestasi atas ketidakmampuannya menyerap nilai-nilai yang melatarbelakangi industrialisasi, serta reaksi negatif terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh proses pembangunan nasional. Hal ini menggiring pada terciptanya mentalitas yang statis, yaitu tiadanya pengenalan kognitif yang tepat mengenai perkembangan dan kemajuan serta adanya sikap tertutup dalam memandang kebermaknaan nilai industrialisasi bagi kehidupan manusia. Padahal dua hal terakhir itu merupakan unsur fundamental dalam membentuk sikap dan mentalitas masyarakat baru yang dinamis.



Dalam kondisi demikian, sudah tentu orang-orang miskin tidak dapat berperan aktif dalam proses-proses pembangunan dan tidak pula mendapatkan peluang untuk mendinamisaikan kehidupannya, baik dalam arti materi maupun non materi. Oleh karena itu tidak jarang mereka seperti terpisah dari siklus kehidupan pada umumnya. Mereka hanya bergaul antar sesama orang miskin dengan budayanya yang mencerminkan kemiskinan. Jika keberadaan mereka relatif abadi dalam kemiskinan, maka jelas hal ini merupakan beban pembangunan nasional. Oleh karena itu sejak pemerintahan Orde Baru melalui program-program pembangunannya pemerintah telah memberikan perhatian yang serius dalam upaya menangani masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang kompleks. Kompleksitasnya tidak sekedar terkait dengan aspek ekonomi, melainkan pula terkait dengan aspek budaya. Artinya orang-orang miskin senantiasa hidup dengan budaya kemiskinannya. Bahkan tampak ada benang merah bahwa mengentalnya fenomena kemiskinan adalah karena faktor intern dan ekstern, dimana antara keduanya terdapat hubungan yang sangat berarti. Faktor ekstern berupa gejala ketidakmerataan kekayaan dan kemakmuran akibat sistem perekonomian dan kebijaksanaan yang ada (perspektif ekonomi), sedangkan faktor intern merupakan faktor budaya, yaitu mentalitas masyarakat miskin yang semakin

mengentalkan kemiskinan itu sendiri, yang terbentuk sebagai akibat negatif faktor ekstern.

Oleh karena itu maka melihat kemiskinan tidaklah memadai apabila dipandang dalam perspektif ekonomi saja. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang multi dimensional, sehingga upaya pengentasannya pun haruslah merupakan usaha yang multi dimensional pula, di mana pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan.

Mengentaskan kemiskinan melalui perspektif budaya berarti membina sikap mental dan moralitas mereka untuk tidak miskin. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa budaya kemiskinan merupakan pengejawantahan dari sikap mental kemiskinan itu sendiri, seperti fatalistik, etos kerja rendah, ketergantungan yang tinggi, rendah diri, dan sejenisnya. Asumsi ini dilandaskan pada kebudayaan itu sendiri yang timbul sebagai hasil hubungan dialogis antara manusia dengan dunia sebagai wahana huniannya (Poepowardojo, 1993:52). Budaya kemiskinan ini jika berlangsung secara berlarut-larut akan menjadikan masyarakat miskin menjadi kurang manusiawi. Demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat mendesak mereka dengan mudah melepaskan norma-norma kemanusiaannya. Dan kondisi semacam ini menjadi lebih parah lagi manakala mereka tidak menemukan titik harapan bagi perbaikan

nasibnya di masa-masa mendatang.

Dengan demikian upaya mengentaskan kemiskinan tidak cukup jika hanya dilaksanakan dari sektor ekonomi saja, seperti memberikan bantuan kebutuhan hidup, pinjaman modal, dan sejenisnya, melainkan harus dibarengi dengan pembinaan sikap, mental, dan moral, agar mereka kembali menjadi manusia yang teguh memegang sendi-sendi kemanusiaannya.

Dalam hal membina sikap mental dan moral masyarakat miskin, Pendidikan Umum sangat *peduli*, karena memang Pendidikan Umum merupakan program pendidikan yang dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaan secara menyeluruh dan seimbang, sehingga dapat benar-benar menjadi manusia yang utuh dalam arti manusia yang dapat mengenali jati dirinya serta mengenali martabat kemanusiaannya. Manusia yang demikian sudah tentu adalah manusia yang dapat membebaskan diri dari belenggu kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Hal ini selaras dengan apa yang ditegaskan oleh Wolfgang Klafki, bahwa Pendidikan Umum mempunyai tujuan untuk (1) the development of human power, (2) the comprehensive education of man, the education of head, heart, and hand. (3) general education for all (Nursid Sumaatmadja, 1992).

Hal ini berarti bahwa melalui Pendidikan Umum diberikan pembinaan moral dan sikap mental yang mampu

menyentuh afeksi mereka, sehingga hati nurani mereka tergugah untuk dapat menatap kehidupan secara positif. Pembinaan moral dan sikap mental bagi orang-orang miskin sangat penting, karena hal ini merupakan dasar bagi pembinaan sumber daya manusia. Mentalitas dan moralitas yang khas orang miskin seperti inferioritas, fatalistis, tidak percaya diri, dan sejenisnya dibina melalui proses Pendidikan Umum, sehingga menjadi manusia yang mempunyai moralitas dan mentalitas yang positif, yang selaras dengan alam pembangunan.

Selain itu mereka pun perlu dilatih dengan sejumlah keterampilan tertentu yang secara fisik dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan dimilikinya sejumlah keterampilan pada masyarakat miskin dimana hal ini dapat digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya, mereka akan lebih memiliki harapan akan kehidupan di masa mendatang yang lebih baik. Mereka memiliki rasa percaya diri untuk menyongsong hari esok yang lebih cerah.

Dalam perspektif Pendidikan Umum, pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat miskin tersebut tidaklah sekedar berhenti pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu saja, melainkan lebih jauh dari itu adalah terbinanya kualitas moral yang tinggi seperti pemilikan etos kerja yang tinggi, semangat kerja keras.

mandiri, perencanaan hidup secara sistematis, dan sebagainya sehingga masyarakat dapat terlepas dari budaya kemiskinan. Paulo Freire (1985:32) menegaskan mengenai hal ini sebagai berikut:

"Dari para pendidik, andil khusus yang diperlukan untuk masyarakat yang baru lahir ini adalah pendidikan kritis yang akan membantu terbentuknya sikap-sikap yang kritis, mengangkat kesadaran naif rakyat yang telah menenggelamkannya dalam proses sejarah dan membuatnya mudah termakan irasionalitas. Hanya pendidikan yang memperlancar pergeseran kesadaran transitif-naif ke kesadaran transitif-kritis yang akan mengembangkan kemampuan manusia untuk melihat tantangan-tantangan dari zamannya, yang akan dapat menyiapkan rakyat untuk melawan kecenderungan emosional dari masa transisi"

Bagi pengembangan program Pendidikan Umum di perguruan tinggi, penyajian fenomena kemiskinan merupakan hal yang penting, agar mahasiswa memiliki kepedulian sosial untuk berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan, baik dalam posisi dirinya sebagai mahasiswa maupun sesuai dengan profesinya kelak. Ada kesan empirik, bahwa perkuliahan PU selama ini, khususnya melalui perkuliahan IBD kurang menyajikan fenomena kemiskinan ini secara memadai. Kemiskinan lebih banyak disajikan secara teoritis belaka.

#### **B. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat miskin merupakan komunitas manusia yang hidup terbelakang. Mereka tidak dapat bersaing dengan perkembangan kehidupan pada umumnya, sebagai akibat

ketiadaan fasilitas baik fisik maupun psikhis, sehingga mereka selalu tertinggal dan tidak dapat menikmati hasil-hasil perkembangan kehidupan secara nyata.

Secara ekonomis, masyarakat miskin mendapatkan penghasilan yang rendah, sekedar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bahkan sering kekurangan. Jam kerja mereka tidak terbatas serta peluang kerjanya bersifat musiman (tidak permanen). Mereka pada umumnya tergolong ke dalam kelompok tenaga kerja yang tidak terampil (unskilled labour)(Suparlan, 1984:14, Mc.Gee dalam Manning dan Effendi, 1985:85).

Ketertinggalan dalam bidang ekonomi ini menempatkan mereka pada status sosial yang rendah. Pendidikan mereka relatif rendah atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali, karena ketiadaan dana dan peluang untuk mendapatkannya. Pemukiman yang mereka huni pada umumnya berupa pemukiman kumuh, dengan kondisi lingkungan yang tidak memperhatikan segi kesehatan bahkan sering pula mengabaikan segi keamanan. Bahkan terkadang mereka menempati bangunan sementara pada lahan yang kosong dan berstatus sebagai penghuni liar.

Kemiskinan merupakan standar tingkat hidup yang rendah. Pertama, dapat dipandang sebagai tingkat kekurangan materi yang antara lain terlihat dalam hal pemilikan tanah, rumah, uang, emas, peralatan rumah



tangga, dan harta benda lainnya. Kedua, kemiskinan pun dapat dipandang sebagai tingkat kekurangan non materi, yaitu meliputi berbagai macam kekurangan untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam organisasi, serta melakukan hubungan-hubungan sosial.

Kondisi-kondisi yang menyertai mereka sebagaimana diuraikan di atas menjadikan tiadanya kesempatan pada diri mereka untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial, baik yang berkenaan dengan aspek ekonomi (pemenuhan kebutuhan sandang-pangan), aspek politik (keikutsertaan dalam organisasi sosial politik), maupun jaringan sosial yang dapat menciptakan pekerjaan yang layak, pembinaan keterampilan yang memadai, serta perolehan informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

Kemiskinan di daerah perkotaan menjadi lebih kompleks lagi permasalahannya. Hal ini disebabkan pada kedudukan kota itu sendiri yang tersusun dalam suatu jaringan yang bertingkat-tingkat serta merupakan pusat pemerintahan dan pendorinasian bagi pengaturan kesejahteraan kehidupan warga masyarakat secara luas. Mekanisme ini tidak sekedar melibatkan aspek-aspek politik dan administrasi saja, melainkan menyertakan pula aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, komunikasi dan transportasi. Kenyataan inilah yang menjadikan banyak manusia terdorong untuk pergi dan tinggal di daerah

perkotaan daripada tinggal di daerah pedesaan. Maka dapat diduga bahwa penduduk kota jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang berada di daerah pedesaan.

Daerah perkotaan memang tampak dinamis dan memiliki potensi yang besar untuk menampung berbagai macam tenaga kerja, dari yang kasar sampai yang halus, dari yang bersih sampai yang kotor, dan dari yang bermoral sampai kepada yang tidak bermoral (Suparlan, 1984:18). Namun demikian tidak berarti bahwa mereka yang hidup di daerah perkotaan semuanya dapat memperoleh kemajuan dan menikmati kesejahteraan. Di antara mereka banyak yang kalah dalam bersaing sehingga terpelanting dari dinamika kehidupan kota. Mereka ini adalah masyarakat marginal yang berkarakteristik miskin. Nuansa individualistik dari kehidupan masyarakat kota lebih menjadikan antar anggota masyarakat yang satu dengan lainnya tidak perduli. Hal ini memperkokoh jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin, baik dalam konteks sosial, politik, maupun budaya. Mereka terbelah dan merasa asing antara satu dengan lainnya. Tidak jarang juga diantara kedua kelompok ini terdapat rasa saling mencurigai.

Komunitas miskin perkotaan dengan warna kehidupannya melahirkan kebudayaan tersendiri. Kebudayaan mereka ini muncul sebagai perwujudan dari adaptasi mereka terhadap lingkungan dan situasi kemiskinan yang mereka

hadapi. Dalam kondisi serba kurang mereka tidak mampu memperoleh kebutuhan-kebutuhan kehidupan secara layak, yang primer sekalipun. Itulah sebabnya, mereka pada umumnya hidup di daerah kumuh dengan kondisi yang penuh sesak dengan penghuni. Kebutuhan-kebutuhan yang selalu mendesak untuk dipenuhi, memaksa perilaku-perilaku negatif dilakukan oleh mereka. Peristiwa pencurian merupakan hal yang mereka anggap biasa. Beberapa wanita pun rela menjajakan dirinya secara murah sekedar mendapatkan sedikit uang, tidak terkecuali mereka yang bersuami. Dalam kehidupan mereka pun banyak dijumpai adanya praktek hidup bersama tanpa nikah, sebagai akibat ketidaktahuan dan ketidakmampuan mereka mengikuti norma-norma kehidupan masyarakat pada umumnya. Hidup secara keras bagi mereka merupakan hal yang biasa, sehingga perkelahian, pencopetan, curiga-mencurigai, bukan merupakan hal aneh.

Pola-pola kelakuan dan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang miskin perkotaan sebagaimana diuraikan di atas memang merupakan suatu cara yang tepat untuk dapat tetap melangsungkan kehidupan mereka yang penuh derita itu. Cara hidup inilah yang merupakan landasan bagi terbentuknya kebudayaan kemiskinan. Seperti ditegaskan oleh Lewis (1984:37), bahwa kebudayaan kemiskinan sebenarnya merupakan suatu bentuk adaptasi yang rasional dan cukup pandai dalam usaha mengatasi kemiskinan yang

mereka hadapi.

Kebudayaan kemiskinan dengan karakteristiknya sendiri mengejawantahkan sub moralitas tersendiri pula, yang berbeda karakteristiknya dengan moralitas pada masyarakat umum.

Moralitas merupakan kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut benar atau salah, baik atau buruk, dalam ukuran nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu moralitas inilah yang merupakan ukuran manusia sebagai manusia. Robert H. Libert menegaskan, *morality always concerned with interpersonal, duty, propriety, and expediency* (Kosasih Djahiri, 1992:6).

Terdapat indikasi bahwa sub moralitas masyarakat miskin ini cenderung lestarti, karena selalu diwariskan dari generasi orang tua kepada generasi anak-anaknya. Hal ini terjadi melalui proses sosialisasi baik yang terjadi dalam lingkungan kehidupan keluarga, maupun sosialisasi yang terjadi dalam komunitas mereka.

### **C. Masalah Utama Penelitian**

Orang miskin kota hidup dengan tata nilai dan budaya tersendiri yang cenderung eksklusif di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Bahkan antara keduanya terjadi hubungan saling menguatkan. Kondisi

kemiskinan semakin mengentalkan tata nilai dan budaya mereka, sementara sebaliknya tata nilai mereka pun akan banyak berpengaruh terhadap pola pikir dan pola laku mereka untuk tetap bertahan pada kondisi miskin.

Namun demikian, meskipun kehadiran mereka tampak eksklusif baik dari segi fisik dan penampilan maupun tata nilai di tengah masyarakat pada umumnya, orang-orang miskin kota adalah tetap merupakan bagian dari kesatuan masyarakat kota secara keseluruhan. Apalagi secara politis, pemerintah telah dan akan terus mengupayakan agar kesenjangan antara si miskin dan si kaya tidak terlalu menyolok, sebagai upaya dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur. Oleh pemerintah setempat juga diupayakan agar antara orang miskin dengan orang yang tidak miskin sering bertemu dan terlibat dalam kegiatan sosial secara bersama-sama, seperti melalui kerja bakti, kenduri, pengajian, dan sebagainya.

Sebagai makhluk sosial, memang mau tidak mau mereka melakukan interaksi dan komunikasi dengan pihak lain di luar komunitas mereka. Hal ini mereka lakukan baik dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi mereka maupun dalam mengupayakan rasa aman terhadap diri dan keluarganya.

Namun derita yang panjang dan tiada henti-hentinya yang mereka alami akibat kemiskinan, serta ketidakmenentuan akan harapan di hari esok, menjadikan

mereka tetap mencerminkan dirinya sebagai orang miskin, dengan tata nilai dan moral serta budaya yang khas sebagai orang miskin.

Salah satu hal yang menarik bagi peneliti adalah mengetahui moralitas mereka. Hal ini penting agar dapat dicarikan alternatif model pengentasan kemiskinan secara memadai, tidak hanya berperspektif ekonomi tetapi juga berperspektif Pendidikan Umum, mengingat bahwa fenomena kemiskinan mengejawantahkan tata nilai tertentu. Yang dimaksud moralitas di sini adalah kualitas perbuatan manusia sebagai manusia. Seperti dikatakan oleh Magnis Suseno (1991:19) moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia, bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari kebaikannya sebagai manusia, bukan sebagai pelaku peran tertentu.

Mengungkap moralitas merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Hal ini terkait dengan karakteristik moralitas itu sendiri yang tidak sekedar terartikulasikan dalam perilaku-perilaku individu yang teramati, melainkan pula berkenaan dengan aspek-aspek yang terdapat dalam diri individu yang melatarbekalangi perilaku tersebut. Oleh karena itu upaya mengungkap moralitas seseorang haruslah dilakukan secara komprehensif, jeli, dan mendalam terhadap kehidupan seseorang itu.

Di dalam penelitian ini, moralitas didekati melalui



dua aspek yaitu perilaku moral dan pertimbangan moral. Hal ini seperti ditegaskan oleh Kurtines (1992:88) sebagai berikut:

"... banyak ahli filsafat moral maupun mereka yang menganalisis bahasa moral, kompetensi pertumbuhan moral merupakan suatu keharusan bagi lahirnya tindakan moral. Sebelum suatu tindakan dapat dipandang sebagai suatu tindakan moral, alasan atau motivasi si pelaku melakukan tindakan tersebut harus terlebih dahulu diuji".

Antara pertimbangan moral dengan perilaku moral tidak dapat dipisahkan sama sekali untuk menuju pada pengungkapan moral secara sebenarnya. Kedudukan pertimbangan moral terhadap perilaku moral merupakan kunci awal bagi perbuatan tersebut, apakah dapat dikategorikan sebagai perilaku moral ataukah tidak. Sedangkan kedudukan perilaku moral terhadap pertimbangan moral merupakan manifestasi berupa evidensi akan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dipahami oleh seseorang terhadap suatu keharusan.

Secara operasional, pertimbangan moral merupakan segala hal yang dijadikan sebagai alasan, dorongan, tujuan, sehingga seseorang berbuat sesuatu. Dan perbuatan moral merupakan aktifitas-aktifitas yang tampak dalam segala aspek kehidupan, yang bermanfaat bagi kemaslahatan umum dan didasari oleh tanggung jawab untuk melakukannya.

Keberadaan moralitas dalam diri seseorang tidaklah

terwujud dengan sendirinya, melainkan terbentuk dan terbina melalui jaringan interaksi dan komunikasi antar sesama manusia dan lingkungan sosialnya. Melalui jaringan-jaringan tersebut individu melakukan apresiasi, peniruan, penolakan, pemantapan, dan sebagainya, khususnya terhadap orang-orang tertentu yang oleh individu yang bersangkutan dianggap sebagai figur. Proses-proses psikhis tersebut pada dasarnya merupakan proses sosialisasi moralitas, yang jika disertai dengan sentuhan-sentuhan kesengajaan, sadar tujuan, perencanaan, pengawasan, dan semacamnya akan menjadi proses pendidikan moral.

Bagi individu yang masih dalam taraf kanak-kanak dimana pada dirinya sedang terjadi proses sosialisasi moral, maka figur yang dijadikan rujukan utamanya adalah orang-orang yang terdekat dengannya, yaitu orang dewasa yang berada dalam lingkungan keluarganya, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, dan sebagainya. Begitu juga jaringan lingkungan sosial bagi dirinya adalah lingkungan keluarganya. Hal ini sejalan dengan kemampuan dirinya yang masih kanak-kanak sehingga kemampuan untuk terlibat dalam jaringan interaksi dan komunikasi sosial yang efektif hanya sebatas lingkungan keluarga.

Bagi pihak orang tua sendiri sesuai dengan naluri kemanusiaannya, tumbuh suatu kewajiban untuk mengarahkan, membentuk, dan membina anak-anaknya menjadi manusia yang

baik. Oleh karena itu dilakukan upaya-upaya yang sadar tujuan dan terencana dengan didasari oleh rasa kasih sayang dari orang tua kepada anak-anaknya agar mereka memiliki moralitas yang baik, sebagai dasar bagi mereka dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Manifestasinya dapat berupa upaya yang bersifat verbal maupun yang bersifat perbuatan (keteladanan). Itulah sebabnya dalam keluarga jenis apa pun; kaya atau miskin, terjadi proses pendidikan moral.

Dalam kehidupan keluarga miskin sudah tentu iklim pendidikan moralnya akan banyak diwarnai oleh budaya kemiskinan itu sendiri. Di sinilah sisi lain yang menarik, yang hendak diungkap melalui penelitian ini.

Ada tiga pertanyaan penelitian yang diajukan di sini.

1. Bagaimanakah kualitas perilaku moral orang miskin perkotaan ?.
2. Bagaimanakah motivasi, tujuan, dan alasan yang mendasari perilaku moral orang miskin perkotaan ?
3. Bagaimanakah proses pendidikan moral yang terjadi dalam keluarga orang miskin perkotaan ?.

#### **D. Fokus Penelitian**

Sebagaimana telah ditegaskan terdahulu bahwa moralitas berkenaan dengan baik-buruknya manusia sebagai

manusia, bukan berkenaan dengan baik-buruk sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Oleh karena itu bidang ini berkenaan dengan bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebajikannya sebagai manusia dalam kehidupannya.

Dengan demikian pengungkapan moralitas akan mengalami kesulitan manakala sekedar ditelusuri melalui informasi verbal belaka. Memang informasi verbal jika penggaliannya dilakukan secara cermat dan hati-hati akan dapat mengungkapkan pertimbangan moral seseorang. Namun hal ini baru merupakan bagian dari moralitas. Moralitas mengejawantah dalam seluruh aspek kehidupan manusia, secara wajar dan alami.

Pengungkapan moralitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terlibat secara langsung kehidupan masyarakat miskin, hidup di tengah-tengah mereka, menelusuri sepak terjang yang menggambarkan moralitas mereka. Penelusurannya didasarkan pada titik fokus penelitian berikut :

1. Perilaku sebagai makhluk individu, yaitu terkait dengan tanggung jawab akan perilaku dirinya, tanggung jawab terhadap keluarganya, tanggung jawab terhadap pekerjaan.
2. Perilaku hubungan antar sesama manusia, meliputi kebersamaan (solidaritas sosial), kepedulian sosial, tanggung jawab sosial, serta partisipasi dalam kegiatan

kemasyarakatan.

3. Perilaku sebagai warga negara, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
4. Perilaku pelaksanaan ajaran agama, yang dalam hal ini dikhususkan pada ajaran yang bersifat ritual serta partisipasi dalam organisasi keagamaan.
5. Perilaku hubungan dengan alam sekitar, yaitu meliputi pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan lingkungan sekitar untuk kesejahteraan kehidupan bersama.

Selanjutnya untuk mengungkap proses pendidikan moral yang terjadi di kalangan keluarga masyarakat miskin perkotaan, yang dijadikan titik fokus penelitian adalah perilaku dan peran anggota keluarga yang telah dewasa, yaitu;

1. peran sang ayah, sebagai kepala keluarga,
2. peran sang ibu, sebagai ibu rumah tangga,
3. peran anak di atas usia 17 tahun (jika ada),
4. peran kakek dan atau nenek (jika ada).

#### **E. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang moralitas orang miskin perkotaan yang terjadi di Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, sehingga nantinya akan dapat dicarikan alternatif model pengentasan kemiskinan secara

memadai, dalam perspektif Pendidikan Umum. Selain itu, penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan alternatif bagi pengembangan perkuliahan Pendidikan Umum di perguruan tinggi yang dapat menumbuhkembangkan kepedulian sosial yang tinggi dari mahasiswa terhadap fenomena kemiskinan.

Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendapatkan deskripsi mengenai kualitas perilaku moral orang miskin perkotaan di Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.
2. Mendapatkan deskripsi mengenai motivasi, tujuan, dan alasan yang mendasari perilaku moral orang miskin perkotaan di Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.
3. Mendapatkan deskripsi mengenai proses pendidikan moral dari generasi orang tua kepada anak-anaknya yang terjadi di kalangan keluarga miskin perkotaan di Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah membantu pihak-pihak pengambil kebijakan (pemerintah setempat) khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya dalam mengenali secara cermat karakteristik moralitas masyarakat miskin perkotaan beserta proses sosialisasi



moralnya, sehingga dalam merumuskan kebijaksanaan bagi mereka sebagai upaya pengentasannya dapat dilakukan secara komunikatif dan integratif, tanpa mengabaikan segi-segi normatifnya (signifikansi praktis).

Penelitian ini pun diharapkan pula dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi mahasiswa tentang perilaku moral beserta pertimbangan-pertimbangannya di kalangan masyarakat miskin perkotaan, dengan memperhitungkan faktor-faktor kontekstual secara mendalam dan sistematis (signifikansi teoritis).

Bagi program Pendidikan Umum, penelitian ini merupakan upaya pengembangan dan pendalaman salah satu aspek kajian Pendidikan Umum yaitu moralitas, dalam realitas kehidupan masyarakat, yang dalam hal ini adalah realitas masyarakat miskin. Dengan pengenalan secara mendalam akan realita moralitas masyarakat miskin, dapat disusun strategi pembinaannya dalam rangka ikut serta mengentaskan kemiskinan secara komunikatif. Hal ini selaras dengan substansi Pendidikan Umum sebagai pendidikan bagi semua orang dalam rangka membebaskan mereka dari belenggu kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan.

Konsekuensi dari substansi Pendidikan Umum adalah terciptanya kepedulian yang tinggi dari para mahasiswa terhadap masyarakat miskin, yang kemudian mereka diharapkan lebih jauh berpartisipasi aktif dalam upaya pengentas-

an kemiskinan melalui pembinaan moralitas orang-orang miskin. Dengan demikian perkuliahan program Pendidikan Umum di perguruan tinggi perlu memikirkan alternatif strategi bagi upaya ini.

